

## ABSTRAK

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Belum adanya ketentuan yang jelas dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* menyebabkan pelaksanaan program ini banyak menimbulkan permasalahan baru.

Fenomena inilah yang mendasari dilakukan penelitian ini. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program KUB sebagai program *community development* menciptakan konflik antara masyarakat lokal, perusahaan, dan pemerintah. Informan penelitian berjumlah dua belas orang. Menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan Tipe Penelitian yang Fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji. Dan menggunakan kerangka teori dialektika konflik kekuasaan Dahrendorf dan teori dinamika konflik Galtung.

Penelitian ini memperhatikan *voices, reflektivitas, subjektivitas*, untuk proses analisisnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak semua masalah yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan hanya bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksinya. Program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sebaiknya dirancang untuk mempertanggung jawabkan dampak lingkungan yang terjadi akibat dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena dari penelitian ini diperoleh fakta bahwa kegiatan pemberdayaan yang diimplementasikan melalui KUB yang bertujuan untuk menjalin kedekatan antara perusahaan dengan masyarakat Rahayu, tidak menjadi solusi dan jalan keluar atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan produksi JOB PPEJ. Kedua, konflik yang terjadi harus mendapatkan pengelolaan yang tepat. Karena jika tidak justru akan menimbulkan konflik realistik yang ada menjadi konflik tidak realistik. Fakta dari penelitian ini, konflik yang terjadi antara masyarakat desa Rahayu dengan JOB PPEJ akibat dampak lingkungan *flare* mengakibatkan konflik menjadi berkepanjangan. Karena JOB PPEJ tidak memberikan pengelolaan yang tepat. KUB bukanlah instrument yang tepat dalam menghadapi konflik yang ada. KUB juga tidak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan, hal ini terbukti dari tidak tercapainya tujuan perusahaan dalam pelaksanaan KUB.

Kata kunci: CSR, Konflik kekuasaan, *imperatively coordinated associations*